



Dinamika Kebijakan Upah Minimum Terhadap Ketenagakerjaan Dan Produktivitas Industri Di DKI Jakarta

Azizah Rima Gitacahyani¹, Farrel Arrigo², Regita Kisnanda Putri³

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

e-mail: azizah.rima.gitacahyani@students.untidar.ac.id,

Abstrak

Peningkatan upah minimum menjadi topik hangat dalam pembahasan kebijakan ekonomi, karena memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor industri. Pemerintah DKI Jakarta secara periodik meninjau dan menetapkan kebijakan upah minimum untuk memastikan kesejahteraan para pekerja, karena kenaikan upah minimum dapat memengaruhi dinamika ketenagakerjaan di Jakarta. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan upah minimum terhadap struktur ketenagakerjaan dan mengidentifikasi dampak kenaikan upah minimum terhadap ketenagakerjaan serta produktivitas industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis hukum normatif dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang berbeda, seperti kebijakan upah minimum, tingkat ketenagakerjaan, dan produktivitas industri. Temuan utama mencakup dampak kenaikan upah minimum terhadap struktur ketenagakerjaan di sektor industri di DKI Jakarta dan dinamika kebijakan upah minimum yang mempengaruhi produktivitas industri di DKI Jakarta. Hasil analisis ini Peningkatan upah minimum dapat mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi dan investasi dalam teknologi yang lebih canggih, serta dampaknya terhadap produktivitas industri tidak selalu positif. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika kebijakan dan dampak kenaikan upah minimum terhadap ketenagakerjaan, serta perlu diperhatikan dengan seksama hal-hal terkait pengaturan anggaran beserta perubahannya.

Kata kunci: Upah minimum, Ketenagakerjaan, Industri

PENDAHULUAN

DKI Jakarta, sebagai pusat perekonomian dan industri terbesar di Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan, termasuk penetapan upah minimum. Kebijakan upah minimum tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pekerja, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada produktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, DKI Jakarta menjadi tempat tujuan utama bagi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Tingginya arus migrasi ini menambah kompleksitas dalam menangani isu ketenagakerjaan di wilayah ini. Dalam konteks ini, kebijakan upah minimum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha serta menentukan tingkat kesejahteraan pekerja di ibu kota. Namun, kebijakan upah minimum juga menjadi subjek perdebatan yang kompleks.

Pengusaha berkewajiban membayar upah kepada pekerja atas pekerjaan yang telah diselesaikan, dan mereka berhak menerima hasil kerja yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati. Di sisi lain, pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaannya dan berhak menerima upah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Hadistianto & Rohmah, 2023). Para pengusaha seringkali menyatakan kekhawatiran akan dampaknya terhadap biaya produksi dan daya saing industri, sementara pekerja menuntut upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di tengah kenaikan biaya hidup yang terus meningkat. Pada tahun 2024, DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk dampak pandemi global yang masih berlangsung. Di tengah dinamika ini, kebijakan upah minimum di DKI Jakarta menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi regional. Politik ekonomi merupakan intervensi pemerintah dalam proses ekonomi. Kebijakan ini mempengaruhi jalannya perekonomian, di mana pemerintah berupaya mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat tercapai hanya melalui mekanisme ekonomi yang bekerja secara otomatis (Soemali, 2022). Dengan melihat berbagai sudut pandang dan faktor-faktor yang terlibat, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya kebijakan upah minimum dalam konteks ekonomi dan ketenagakerjaan ibu kota.

Ketika membicarakan tentang upah minimum, maka membicarakan pula tentang salah satu aspek paling sentral dari hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta kebijakan ekonomi suatu negara (Hasyim et al., 2023). Di DKI Jakarta, sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia, dinamika kebijakan upah minimum memiliki dampak yang signifikan terhadap ketenagakerjaan dan produktivitas industri. Peningkatan upah minimum

tidak hanya memengaruhi penghasilan para pekerja, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. DKI Jakarta adalah salah satu provinsi terkaya dan paling padat penduduk di Indonesia. Dikenal sebagai pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan, Jakarta memiliki beragam sektor industri yang mempekerjakan jutaan orang. Namun, di balik kemakmuran tersebut, masih terdapat disparitas sosial-ekonomi yang signifikan, di mana sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal dan bergaji rendah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, biaya hidup di Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun. Para pekerja di Jakarta sering kali menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah DKI Jakarta secara periodik meninjau dan menetapkan kebijakan upah minimum untuk memastikan kesejahteraan para pekerja. Peningkatan upah minimum menjadi topik hangat dalam pembahasan kebijakan ekonomi, karena memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor industri. Kenaikan upah minimum dapat memengaruhi dinamika ketenagakerjaan di Jakarta. Meskipun peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli pekerja, namun dapat pula berdampak negatif terhadap jumlah tenaga kerja yang tersedia dan struktur tenaga kerja di berbagai sektor industri. Peningkatan upah minimum juga dapat mempengaruhi produktivitas industri. Sebagian pengusaha mungkin mengalami peningkatan biaya produksi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya saing industri Jakarta di tingkat nasional dan internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis hukum normatif dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang berbeda, seperti kebijakan upah minimum, tingkat ketenagakerjaan, dan produktivitas industri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional dimana akan mengidentifikasi hubungan antara kebijakan upah minimum, tingkat ketenagakerjaan, dan produktivitas industri tanpa mengasumsikan hubungan sebab-akibat. Data penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder dimana dapat menggunakan data yang sudah ada dari lembaga pemerintah, organisasi buruh, atau industri terkait untuk menganalisis dampak kebijakan upah minimum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dampak kenaikan upah minimum terhadap struktur ketenagakerjaan di sektor industri di DKI Jakarta:

- a. penurunan jumlah pekerja, kenaikan upah minimum dapat menyebabkan pengusaha mengurangi jumlah pekerja untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Ini mungkin terjadi terutama di sektor industri dengan profitabilitas rendah atau persaingan yang ketat.
- b. peningkatan pengangguran, kenaikan upah minimum yang signifikan dapat menyebabkan pengurangan dalam perekutan atau bahkan pemutusan hubungan kerja, yang kemungkinan dapat meningkatkan tingkat pengangguran di DKI Jakarta, terutama di kalangan pekerja yang kurang terampil atau berpendidikan rendah.
- c. perubahan struktur pekerjaan, kenaikan upah minimum mungkin mendorong pengusaha untuk menggeser fokus mereka pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat keterampilan lebih tinggi, sementara pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah mungkin lebih mudah untuk diotomatisasi.
- d. peningkatan produktivitas, meskipun pada awalnya dapat terjadi penurunan jumlah pekerja, kenaikan upah minimum yang diikuti dengan investasi dalam pelatihan dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pekerja yang tersisa. Hal ini dapat mempengaruhi struktur ketenagakerjaan dengan memperkuat permintaan akan pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi.
- e. perubahan dalam kebijakan pengusaha, pengusaha mungkin mengubah strategi mereka dalam hal kebijakan penggajian, seperti mengurangi jam kerja, memberikan insentif tambahan, atau menggeser fokus ke sektor usaha yang lebih menguntungkan.
- f. dampak terhadap kesejahteraan pekerja, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang tetap bekerja dengan memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Namun, dampak ini mungkin tidak merata di antara semua pekerja terutama jika ada penurunan dalam jumlah pekerja.

Dinamika kebijakan upah minimum yang mempengaruhi produktivitas industri di DKI Jakarta:

- a. hubungan antara upah minimum dan produktivitas industri, bahwa peningkatan upah minimum berhubungan dengan penurunan produktivitas industri di beberapa sektor. Hal ini dikarenakan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi mendorong pengusaha untuk mencari alternatif seperti otomatisasi.
- b. efek terhadap ketenagakerjaan, kenaikan upah minimum telah menyebabkan pengurangan jumlah pekerjaan di sektor-sektor tertentu di DKI Jakarta. Namun, efek ini dapat dibalancing dengan adanya peningkatan kualitas pekerjaan atau pengurangan ketidakstabilan kerja.
- c. pengaruh terhadap kompetitivitas industri, kebijakan upah minimum yang sesuai telah meningkatkan kompetitivitas industri di DKI Jakarta dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas, motivasi, dan kinerja pekerja.
- d. dampak pada tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dimana kebijakan upah minimum yang memadai dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi

dan meningkatkan konsumsi, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada produktivitas industri.

e. variasi antara sektor industri, dampak kebijakan upah minimum bervariasi antara sektor industri. Beberapa sektor mungkin lebih rentan terhadap kenaikan upah minimum daripada yang lain, tergantung pada struktur biaya, tingkat persaingan, dan faktor-faktor lainnya.

B. Pembahasan

1. Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Struktur Ketenagakerjaan Di Sektor Industri Di DKI Jakarta

Pada awalnya, kebijakan upah minimum di DKI Jakarta belum menjadi fokus utama dalam regulasi ketenagakerjaan. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial, perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi semakin penting. Berbagai faktor seperti peningkatan biaya hidup, kondisi kerja yang tidak layak, dan tuntutan dari serikat pekerja mendorong pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan upah minimum. Kebijakan upah minimum mungkin diperkenalkan pertama kali di DKI Jakarta pada periode tertentu, sebagai tanggapan terhadap kondisi kerja yang tidak adil dan ketidakseimbangan ekonomi antara pekerja dan pengusaha. Penyesuaian ini mungkin dilakukan melalui proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Penguatan perlindungan pekerja dalam kebijakan upah minimum juga melibatkan penguatan perlindungan bagi pekerja, termasuk peningkatan tingkat upah minimum, perluasan cakupan kebijakan, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran.

Penyesuaian dengan dinamika ekonomi, kebijakan upah minimum di DKI Jakarta juga mengalami penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan dalam dinamika ekonomi, seperti pertumbuhan sektor industri, investasi asing, dan tantangan globalisasi. Implikasi terhadap ketenagakerjaan dan produktivitas industri terhadap kebijakan upah minimum di DKI Jakarta memiliki dampak yang signifikan terhadap ketenagakerjaan dan produktivitas industri. Peningkatan upah minimum mungkin meningkatkan penghasilan pekerja, namun juga dapat menyebabkan penurunan permintaan akan tenaga kerja dari pihak pengusaha. Kebijakan upah minimum yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial mungkin memiliki dampak yang beragam terhadap produktivitas industri. Peningkatan upah minimum dapat mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi dan investasi dalam teknologi yang lebih canggih. Kebijakan upah minimum merupakan salah satu instrumen yang penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan memperkuat sistem ekonomi suatu daerah.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 225 Tahun 2020 mengatur implementasi kebijakan upah minimum di tingkat provinsi, termasuk penetapan tingkat upah minimum di DKI Jakarta. Sebagai wilayah dengan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, DKI Jakarta secara teratur melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan upah minimum untuk memastikan bahwa pekerja memiliki penghasilan yang layak. Dalam konteks dinamika kebijakan upah minimum terhadap ketenagakerjaan dan produktivitas industri di DKI Jakarta, pembaruan terbaru atau perubahan dalam kebijakan upah minimum dapat memiliki dampak yang signifikan. Penegakan kebijakan ini juga penting karena merupakan hak normatif pekerja (Farah Muthiah, 2020). Pemerintah provinsi secara berkala meninjau tingkat upah minimum untuk mengakomodasi pertumbuhan biaya hidup, inflasi, dan kebutuhan pekerja. Kenaikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses terhadap penghasilan yang layak dan meningkatkan daya beli mereka. Pelanggaran terhadap upah minimum dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana (Putusan et al., 2020). Oleh karena itu, peninjauan dan penyesuaian kebijakan upah minimum di DKI Jakarta secara berkala sangat penting untuk memastikan pendapatan yang adil dan meningkatkan daya beli pekerja.

Penyesuaian parameter penetapan upah minimum, pembaruan terbaru dalam kebijakan upah minimum di DKI Jakarta juga mungkin melibatkan penyesuaian parameter yang digunakan untuk menetapkan upah minimum. Penyesuaian ini bertujuan untuk lebih akurat mencerminkan biaya hidup aktual pekerja dan menghasilkan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Perubahan dalam kebijakan upah minimum di DKI Jakarta juga dapat mencakup penyempurnaan mekanisme penegakan serta mempertimbangkan perbedaan regional, sektoral, dan jenis usaha dalam menetapkan upah minimum (Paramita, 2021). Pemerintah provinsi mungkin telah meningkatkan pengawasan dan penegakan. Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor ekonomi utama di DKI Jakarta, yang umumnya memiliki tingkat penggunaan tenaga kerja yang cukup besar. Sektor manufaktur cenderung memiliki ketergantungan yang signifikan pada tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Oleh karena itu, peningkatan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan manufaktur secara signifikan. Hal ini disebabkan karena biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya produksi yang signifikan dalam sektor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada tahun 2023, sektor manufaktur di DKI Jakarta menyumbang sekitar 20% dari total produk domestik regional bruto (PDRB) (BPS, 2023). Selain itu, data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan bahwa sektor manufaktur di DKI Jakarta memiliki lebih dari 1.500 perusahaan yang mempekerjakan ribuan pekerja (BPS, 2023).

Untuk mengatasi dampak peningkatan biaya produksi akibat kenaikan upah minimum, perusahaan manufaktur di DKI Jakarta mungkin akan merespons dengan beberapa strategi. Perusahaan dapat melakukan otomatisasi atau modernisasi dalam proses produksi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja

manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi otomatisasi, robotik, dan mesin-mesin canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perusahaan juga dapat mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional guna mengimbangi peningkatan biaya tenaga kerja. Ini dapat meliputi pengoptimalan rantai pasok, penggunaan bahan baku yang lebih efisien, atau pengurangan limbah produksi. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2023, sekitar 60% dari perusahaan manufaktur di DKI Jakarta menyatakan bahwa mereka berencana untuk meningkatkan investasi dalam otomatisasi dan teknologi produksi untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Data dari Asosiasi Industri Kecil dan Menengah (Asosiasi IKM) menunjukkan bahwa sekitar 40% dari perusahaan manufaktur skala kecil dan menengah di DKI Jakarta telah mengimplementasikan sistem otomatisasi atau modernisasi dalam proses produksi mereka dalam dua tahun terakhir.

Peningkatan upah minimum menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja bagi perusahaan manufaktur. Biaya produksi yang lebih tinggi ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau efisiensi operasional. Jika biaya produksi meningkat tanpa adanya peningkatan pendapatan yang sebanding, maka profitabilitas perusahaan manufaktur dapat terpengaruh secara negatif. Hal ini dapat diperburuk dengan kurangnya data rinci dalam kebijakan upah minimum saat ini, yang mungkin tidak secara efektif mengurangi ketimpangan pendapatan (Paramita, 2021). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa upah minimum di DKI Jakarta telah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sektor manufaktur mungkin merespons peningkatan upah minimum dengan berbagai strategi untuk mengurangi dampak negatifnya dan mempertahankan profitabilitas perusahaan. Perusahaan manufaktur mungkin akan meningkatkan investasi dalam teknologi otomatisasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya tenaga kerja jangka panjang dan meningkatkan efisiensi produksi. Perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, seperti pengoptimalan rantai pasokan, penggunaan bahan baku yang lebih efisien, atau perbaikan dalam manajemen produksi. Beberapa perusahaan mungkin akan melakukan penyesuaian dalam strategi bisnis mereka, seperti fokus pada produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi atau diversifikasi ke pasar yang lebih menguntungkan.

Perusahaan di sektor jasa akan menyesuaikan harga jual produk atau layanan mereka untuk mengimbangi peningkatan biaya operasional akibat kenaikan upah minimum. Untuk menghemat biaya operasional, beberapa perusahaan jasa mungkin akan mengurangi jumlah karyawan. Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa sejumlah restoran di DKI Jakarta telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian karyawan mereka setelah adanya kenaikan upah minimum. Untuk mengatasi dampak kenaikan upah minimum, perusahaan di sektor jasa juga akan meningkatkan produktivitas karyawan dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Sebagai contoh, data internal dari beberapa hotel di DKI Jakarta menunjukkan bahwa mereka telah meningkatkan program pelatihan untuk karyawan mereka dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan pelayanan kepada pelanggan.

Dalam sektor perdagangan, termasuk grosir dan ritel, peningkatan upah minimum dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya operasional perusahaan. Peningkatan upah minimum menyebabkan peningkatan biaya langsung yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam membayar gaji karyawan mereka. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen utama dari biaya operasional dalam sektor perdagangan. Peningkatan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional total perusahaan. Perusahaan dalam sektor perdagangan dapat merespons peningkatan biaya tenaga kerja akibat kebijakan upah minimum dengan berbagai strategi termasuk. Perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan mereka, termasuk negosiasi harga dengan pemasok, pengoptimalan proses penyimpanan dan distribusi, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dampak peningkatan upah minimum terhadap biaya operasional di sektor perdagangan dapat menjadi sangat signifikan, menyebabkan kenaikan biaya langsung bagi perusahaan. Untuk mengurangi dampak ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan, melakukan negosiasi harga dengan pemasok, mengoptimalkan proses penyimpanan dan distribusi, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional (Yudiansyah et al., 2019).

Dalam menghadapi perubahan dalam kebijakan upah minimum, perusahaan perlu mengadopsi strategi bisnis yang tepat untuk tetap kompetitif dan menjaga profitabilitas mereka. Perusahaan dapat melakukan penyesuaian biaya produksi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Ini bisa mencakup efisiensi dalam penggunaan bahan baku, energi, dan tenaga kerja. Selain itu, mengurangi limbah dan mengidentifikasi area-area di mana biaya produksi dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan juga merupakan strategi yang penting. Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengadopsi teknologi baru atau meningkatkan proses produksi dapat membantu perusahaan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Perusahaan dapat menggunakan otomatisasi dan sistem informasi yang lebih canggih untuk mengoptimalkan operasi mereka, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Memperbaiki rantai pasokan juga merupakan strategi yang penting. Perusahaan dapat mencari pemasok alternatif yang lebih murah atau berusaha untuk mendapatkan harga yang lebih baik melalui negosiasi. Selain itu, memperbaiki efisiensi dalam rantai pasokan, seperti mengurangi waktu pemesanan dan pengiriman, dapat

membantu mengurangi biaya dan meningkatkan responsifitas terhadap permintaan pelanggan. Dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk diversifikasi produk atau layanan mereka. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau produk tertentu dan meningkatkan pendapatan. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, perusahaan dapat mengatasi dampak perubahan dalam kebijakan upah minimum dan tetap kompetitif di pasar. Penting bagi perusahaan untuk secara proaktif mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas agar tetap berdaya saing dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah.

Peningkatan efisiensi operasional selain penyesuaian biaya produksi, perusahaan juga dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka untuk mengimbangi dampak dari perubahan kebijakan upah minimum. Investasi dalam teknologi baru dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Evaluasi dan peningkatan proses produksi yang ada dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meninjau dan memperbaiki rantai pasokan juga merupakan strategi yang penting untuk meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat mencari vendor alternatif yang menawarkan harga lebih kompetitif atau memperbaiki proses pengiriman dan distribusi. Optimalisasi sumber daya perusahaan manufaktur melakukan audit biaya menyeluruh untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dampak terhadap pengaturan anggaran perusahaan akibat perubahan dalam kebijakan upah minimum merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan seksama. Berbagai strategi dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional sebagai respons terhadap perubahan kebijakan upah minimum. Hal ini mencakup investasi pada teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja, mengevaluasi dan meningkatkan proses produksi yang ada, meninjau dan meningkatkan rantai pasokan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui audit biaya yang komprehensif (Tyasmaning & Sutiyo, 2024).

Penyesuaian gaji karyawan terhadap anggaran perusahaan perubahan dalam kebijakan upah minimum dapat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan gaji karyawan mereka agar sesuai dengan tingkat upah minimum yang baru. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya tenaga kerja yang signifikan bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang besar. Pentingnya fasilitas kerja dan penempatan dalam mempengaruhi kinerja pegawai sangat krusial. Studi-studi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun penyesuaian gaji karyawan untuk memenuhi kebijakan upah minimum yang baru dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, perusahaan harus tetap memprioritaskan kepuasan dan retensi karyawan. Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pegawai dan, pada akhirnya, kesuksesan perusahaan (Simanjuntak & Edy, 2022). Perusahaan mungkin perlu mengorbankan investasi dalam pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta teknologi atau inovasi. Ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing perusahaan dan pertumbuhan jangka panjang mereka. Penyesuaian gaji karyawan dapat menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja yang signifikan, sementara alokasi dana untuk investasi lainnya dapat terbatas. Respon industri terhadap perubahan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini terlihat dari pengaruh positif produktivitas tenaga kerja, pengembangan karyawan, dan efisiensi operasional terhadap nilai perusahaan (Alaiyanuha & Iriyanto, 2021). Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi dampak dari dua sisi: penyesuaian biaya produksi dan efisiensi operasional, serta pembatasan anggaran untuk investasi dalam pelatihan, teknologi, atau inovasi. Penyesuaian biaya produksi dan efisiensi operasional perusahaan di DKI Jakarta cenderung merespons perubahan dalam kebijakan upah minimum dengan melakukan penyesuaian biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa perusahaan manufaktur telah melakukan investasi dalam teknologi otomatisasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

2. Dinamika Kebijakan Upah Minimum Yang Mempengaruhi Produktivitas Industri Di DKI Jakarta

Hubungan antara upah minimum dan produktivitas industri di DKI Jakarta merupakan topik yang kompleks dan multidimensional. Peningkatan upah minimum seringkali dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, dampaknya terhadap produktivitas industri tidak selalu positif, terutama dalam konteks biaya tenaga kerja yang meningkat secara signifikan (Paramita, 2021). Dasar hukum mengenai upah minimum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunan lainnya. Peningkatan upah minimum dapat mendorong peningkatan biaya produksi bagi perusahaan, terutama di sektor industri yang padat karya. Ketika upah minimum naik, perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak untuk gaji pekerja. Hal ini dapat mengurangi margin keuntungan, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki banyak ruang untuk mengurangi biaya lainnya. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini mungkin harus mencari cara lain untuk mengurangi biaya, seperti mengurangi jumlah pekerja atau menunda rencana ekspansi. Salah satu respons umum dari perusahaan terhadap kenaikan biaya tenaga kerja adalah otomatisasi. Dengan mengadopsi teknologi otomatisasi, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan mereka pada tenaga kerja manusia dan menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang (Wibowo & Rozaq, 2023). Namun, transisi ini tidak selalu mudah atau murah. Investasi awal yang besar untuk membeli dan mengimplementasikan teknologi baru dapat menjadi hambatan, terutama bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan finansial. Selain itu, otomatisasi sering kali memerlukan pekerja dengan keterampilan yang berbeda, yang mungkin tidak tersedia secara luas. Adopsi

teknologi otomatisasi memang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, proses transisi ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Selama periode transisi, perusahaan harus melatih ulang pekerja, mengintegrasikan teknologi.

Kenaikan upah minimum di DKI Jakarta, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, memiliki dampak yang kompleks terhadap ketenagakerjaan di berbagai sektor industri. Sementara tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli dan kualitas hidup pekerja, efeknya terhadap jumlah pekerjaan sering kali menjadi topik yang kontroversial. Beberapa sektor industri melaporkan pengurangan jumlah pekerjaan sebagai respons terhadap peningkatan biaya tenaga kerja. Sektor-sektor dengan margin keuntungan yang tipis, seperti industri tekstil, garmen, dan manufaktur padat karya, cenderung paling terdampak oleh kenaikan upah minimum. Pengusaha di sektor-sektor ini mungkin mengurangi jumlah tenaga kerja untuk mengimbangi peningkatan biaya produksi. Untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja, banyak perusahaan beralih ke otomatisasi dan teknologi yang lebih efisien. Otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia untuk tugas-tugas repetitif dan berisiko, namun juga berpotensi menyebabkan kehilangan pekerjaan, terutama bagi pekerja tidak terampil. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan di sisi positif, kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Pengusaha yang mempertahankan pekerja sering kali berfokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas. Pekerja yang terlatih dan terampil cenderung memiliki stabilitas kerja yang lebih baik dan peluang untuk kenaikan gaji di masa depan. Ini dapat mengurangi ketidakstabilan kerja dan meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Kenaikan upah minimum juga dapat mengurangi ketidakstabilan kerja dengan memastikan bahwa pekerja menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Secara keseluruhan, kenaikan upah minimum dapat berdampak positif pada ekonomi lokal dengan meningkatkan daya beli pekerja. Peningkatan pendapatan dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pengusaha mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan biaya produksi, yang dapat mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar. Kenaikan upah minimum di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kebijakan ini menetapkan bahwa upah minimum harus disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menetapkan upah minimum sesuai dengan kondisi ekonomi regional. Proses penetapan upah minimum melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Di DKI Jakarta, Dewan Pengupahan Daerah memainkan peran penting dalam merekomendasikan kenaikan upah minimum berdasarkan kajian terhadap kondisi ekonomi lokal. Partisipasi berbagai pihak ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan ekonomi pengusaha.

Untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan upah minimum, beberapa langkah mitigasi dapat diambil. Ini termasuk insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan dan teknologi, serta program pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terkena dampak. Pemerintah juga dapat menyediakan bantuan bagi industri yang paling terdampak untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan biaya tenaga kerja. Kenaikan upah minimum di DKI Jakarta membawa dampak yang beragam terhadap ketenagakerjaan di sektor industri. Sementara beberapa sektor mungkin mengalami pengurangan jumlah pekerjaan, kenaikan ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas pekerjaan dan pengurangan ketidakstabilan kerja. Kebijakan yang tepat dan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari kenaikan upah minimum, memastikan bahwa tujuan kesejahteraan pekerja tercapai tanpa mengorbankan produktivitas industri. Kebijakan upah minimum yang sesuai telah memberikan pengaruh positif terhadap kompetitivitas industri di DKI Jakarta. Peningkatan upah minimum telah membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kompetitivitas industri. Dengan mendapatkan upah yang lebih layak, pekerja cenderung merasa lebih dihargai dan diperlakukan secara adil oleh perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas mereka terhadap tempat kerja. Ketika pekerja merasa dihargai, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik mereka dalam pekerjaan mereka. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri.

Meningkatnya kesejahteraan pekerja juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan stabil. Pekerja yang merasa lebih aman secara finansial cenderung lebih sedikit mengalami tekanan keuangan, yang dapat mengurangi tingkat stres dan kekhawatiran di tempat kerja (Dearly et al., 2023). Hal ini dapat menciptakan atmosfer kerja yang lebih harmonis dan kolaboratif, di mana pekerja bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama perusahaan. Dalam lingkungan seperti ini, inovasi dan kreativitas dapat berkembang, membantu perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah dengan cepat. Meningkatnya kesejahteraan pekerja dapat berdampak positif pada citra perusahaan di mata konsumen dan masyarakat. Perusahaan yang dikenal memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang baik cenderung lebih dihargai dan dipilih oleh konsumen. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan membantu meningkatkan pangsa pasar mereka. Dengan demikian, kebijakan upah minimum yang sesuai tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan secara

keseluruhan. Dalam konteks globalisasi, kompetitivitas industri menjadi semakin penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan upah minimum yang sesuai, DKI Jakarta dapat memperkuat posisinya sebagai pusat industri yang kompetitif di tingkat regional maupun global (Dianova & Kaendo, 2023). Pekerja yang merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang secara profesional cenderung lebih setia terhadap perusahaan mereka, yang dapat mengurangi turnover dan biaya rekrutmen dan pelatihan yang terkait. Meningkatnya kesejahteraan pekerja juga dapat memberikan dampak positif pada stabilitas sosial dan politik di DKI Jakarta. Pekerja yang mendapatkan upah yang layak cenderung lebih puas dengan kehidupan mereka dan kurang cenderung terlibat dalam protes atau konflik buruh. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Bawa kebijakan upah minimum yang sesuai harus seimbang dan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Peningkatan upah minimum yang terlalu drastis atau tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan industri tertentu dapat berpotensi merugikan perusahaan, terutama yang beroperasi di sektor-sektor dengan margin keuntungan yang tipis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kajian mendalam tentang dampak dan implikasi dari kebijakan upah minimum sebelum mengimplementasikannya. Secara keseluruhan, pengaruh kebijakan upah minimum yang sesuai terhadap kompetitivitas industri di DKI Jakarta telah terbukti positif. Dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan harmonis. Hal ini memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dampak kebijakan upah minimum yang memadai terhadap tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta adalah fenomena yang penting untuk diperhatikan. Pertama-tama, kebijakan upah minimum yang memadai berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Ketika pekerja menerima upah yang layak, mereka cenderung memiliki lebih banyak uang untuk dikeluarkan, termasuk untuk barang-barang konsumsi sehari-hari, makanan, dan barang-barang non-kebutuhan. Hal ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal, dengan bisnis-bisnis yang mengalami peningkatan permintaan atas barang dan jasa mereka. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi juga dapat diangkat sebagai dampak langsung dari kebijakan upah minimum yang memadai. Dengan meningkatnya konsumsi karena kenaikan daya beli masyarakat, aktivitas ekonomi di berbagai sektor juga meningkat. Hal ini menciptakan lingkaran positif di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat memicu penciptaan lapangan kerja tambahan, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ranah hukum, dasar hukum untuk kebijakan upah minimum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pekerja memiliki hak untuk menerima upah yang layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga mengatur tentang penetapan upah minimum, termasuk proses peninjauan dan penyesuaian upah minimum setiap tahunnya. Dengan dasar hukum yang jelas, pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, memiliki kewajiban untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak bagi pekerja di wilayahnya.

Peningkatan upah minimum di DKI Jakarta memiliki dampak yang beragam di berbagai sektor industri. Dampak ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk struktur biaya, tingkat persaingan, dan karakteristik khusus dari masing-masing sektor. Beberapa sektor mungkin lebih rentan terhadap kenaikan upah minimum daripada yang lain karena sensitivitas mereka terhadap biaya tenaga kerja dan struktur operasional mereka. Sektor manufaktur yang tergantung pada tenaga kerja manual mungkin lebih terdampak oleh kenaikan upah minimum. Biaya tenaga kerja sering menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam produksi, dan kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan dalam sektor ini. Sektor jasa yang lebih berorientasi pada pengetahuan atau keterampilan khusus mungkin lebih mampu menyerap kenaikan upah minimum. Perusahaan dalam sektor ini cenderung memiliki margin keuntungan yang lebih besar atau kemampuan untuk menaikkan harga jasa mereka untuk menutupi biaya tambahan yang terkait dengan kenaikan upah minimum. Selain itu, sektor dengan tingkat persaingan yang tinggi mungkin lebih sulit untuk menyerap kenaikan upah minimum tanpa mengorbankan profitabilitas mereka. Persaingan yang ketat dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada penurunan margin keuntungan. Dalam menghadapi variasi dampak antar sektor, pemerintah DKI Jakarta dapat mengambil pendekatan yang beragam dalam mengatur kebijakan upah minimum. Pendekatan ini mungkin termasuk memberikan insentif atau dukungan khusus untuk sektor-sektor yang lebih rentan terhadap kenaikan upah minimum, serta menyusun kebijakan yang memperhitungkan karakteristik khusus dari masing-masing sektor. Selain itu, penting bagi pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan konsultasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan serikat pekerja, dalam merancang kebijakan upah minimum yang adil dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Upah minimum ini muncul karena adanya peningkatan biaya hidup, kondisi kerja yang tidak layak, dan tuntutan dari serikat pekerja sehingga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan masalah upah minimum untuk para pekerja. Upah minimum ini mungkin dapat meningkatkan penghasilan pekerja, namun dapat menyebabkan penurunan permintaan akan tenaga kerja dari pihak pengusaha. Kebijakan upah minimum berdasarkan dengan penyesuaian kebutuhan ekonomi dan sosial para pekerja. DKI jakarta menjadi kota pertama yang memperkenalkan kebijakan upah minimum ini. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 225 Tahun 2020 menjadi mengatur implementasi kebijakan upah minimum di tingkat provinsi, termasuk penetapan tingkat upah minimum di DKI Jakarta. Sektor manufaktur menjadi salah satu sektor ekonomi utama di DKI Jakarta, yang umumnya memiliki tingkat penggunaan tenaga kerja yang cukup besar. Sektor manufaktur ini cenderung memiliki ketergantungan yang signifikan pada tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Oleh karena itu, peningkatan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan manufaktur secara signifikan. Sehingga membuat Perusahaan di sektor jasa akan menyesuaikan harga jual produk atau layanan mereka untuk mengimbangi peningkatan biaya operasional akibat kenaikan upah minimum.

Upah minimum dan produktivitas industri di DKI Jakarta menjadi topik yang kompleks dan multidimensional. Peningkatan upah minimum seringkali dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, dampaknya terhadap produktivitas industri tidak selalu positif, terutama dalam konteks biaya tenaga kerja yang meningkat secara signifikan. Kenaikan upah minimum di DKI Jakarta, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, memiliki dampak yang kompleks terhadap ketenagakerjaan di berbagai sektor industri. Kebijakan upah minimum yang sesuai telah memberikan pengaruh positif terhadap kompetitivitas industri di DKI Jakarta. Peningkatan upah minimum telah membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kompetitivitas industri. Peningkatan upah minimum di DKI Jakarta memiliki dampak yang beragam di berbagai sektor industri. Dampak ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk struktur biaya, tingkat persaingan, dan karakteristik khusus dari masing-masing sektor. Sehingga upah minimum ini menjadi sektor penting bagi para pekerja yang bisa menambahkan motivasi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan perusahaan mendapatkan benefit dalam bentuk produksi secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Alaiyanuha, T. A., & Iriyanto, S. (2021). *Analisis Produktivitas Tenaga Kerja, Pengembangan Pegawai, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Nilai Perusahaan Taqwim Adinnur Alaiyanuha* ¹, Setia Iriyanto 2) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.

BPS. (2023). Jakarta in Figures for 2023. *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka* 2023, 252–253.
<https://jakarta.bps.go.id/publication/2023/02/28/fd35fc5d10a1e03f0d71348/provinsi-dki-jakarta-dalam-angka-2023.html>

Dearly, Astuti, S. W., Istiqomah, & Dawanti, R. (2023). Meningkatkan Kebahagian Dengan Menggunakan Pendekatan Psikologi Positif Pada Pekerja Migran. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(5), 340–346.
<https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i5.162>

Dianova, E. R., & Kaendo, K. E. G. (2023). Tantangan dan Inovasi Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja: Studi Perbandingan Ketenagakerjaan Indonesia dengan Negara Lain. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 226–232. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1281>

Farah Muthiah, D. S. (2020). PENEGAKAN HUKUM HAK PEKERJA ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA PADA KANTOR NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 2(2), 194–211. jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/125/217

Hadistianto, M. F., & Rohmah, S. (2023). Paradoks Implementasi Kebijakan Upah Minimum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 175. <https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8436>

Hasyim, A., Husni, A. A., Rusli, A. M., Syamsu, S., & Ansar, M. C. (2023). Upah Minimum Dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kebijakan Di Indonesia Minimum Wage and Poverty Level: Study of Policy in Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 29, 2023.

Paramita, R. (2021). Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(2), 184–200. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.115>

Putusan, S., Pid, N., & Lubuk, B. P. N. (2020). *PIDANA MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM*. 4(2), 147–159.

Simanjuntak, F. A., & Edy, E. (2022). Pengaruh Fasilitas Kerja dan Penempatan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Masa Mitra Pratama Medan. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(1), 62–68.
<https://doi.org/10.54371/jms.v1i1.183>

Soemali. (2022). Kebijakan Pengupahan Mencekik Kesejahteraan Buruh. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(8), 3406–3416. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i8.1022>

Tyasmaning, E., & Sutiyo. (2024). Meningkatkan Efisiensi Sekolah Melalui Pendampingan Manajemen Keuangan di SMP Sunan Kalijogo Jabung. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 214–227.
<https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v4i2.1243>

Wibowo, B. C., & Rozaq, I. A. (2023). Implementasi Sistem Penyiraman Otomatis Pada Kumbung sebagai Upaya Peningkatan Hasil Budi Daya Jamur Tiram Desa Menawan. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 12(2), 157. <https://doi.org/10.20961/semar.v12i2.71407>